

JURNAL KOMPILEK

Jurnal Kompilasi Ilmu Ekonomi

Retno Murni Sari

PENGARUH STOCK SPLIT, EARNING PER SHARE, DAN DIVIDEN PER SHARE TERHADAP PERUBAHAN HARGA SAHAM (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur di BEI)

Sandi Eka Suprajang

PENGARUH KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN DALAM MEMBELI PRODUK (Studi pada Mahasiswa STIE Kesuma Negara Blitar Pengguna Kartu Selular IM3)

Fajriya
Muthmainah

ANALISIS RASIO ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) UNTUK MENGIKUR KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kota Blitar)

Reti Nurhabibah

PENENTUAN TARIF JASA RAWAT INAP DENGAN METODE ACTIVITY-BASED COSTING SYSTEM PADA RUMAH SAKIT UMUM "NGUDI WALUYO" WLINGI (Studi Kasus Pada Rumah Sakit Umum Ngudi waluyo Wlingi)

Djoko Sularso

ANALISIS SEBELUM DAN SESUDAH PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NO. 43/PMK.010/2012 TERHADAP UANG MUKA, PENCAIRAN DAN PENJUALAN KENDARAAN BERMOATOR PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN (Studi Kasus Pada PT. Sasana Artha Finance Cabang Blitar)

Irma Yulianti Ningsih/
Fadia Zen

PENGARUH TOTAL ASSET TURNOVER DAN DEBT TO EQUITY RATIO TERHADAP NILAI PERUSAHAAN TOBIN'S Q MELALUI RENTABILITAS EKONOMI PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG LISTING DI BEI PERIODE 2008–2011 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN PADA KECAMATAN BANGKALAN

Rosita Ratnasari/
Yudhanta
Sambharakreshna

KEMAMPUAN RASIO KEUANGAN SEBAGAI ALAT UNTUK MEMPREDIKSI PERINGKAT OBLIGASI PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI

[Vol 5, No. 1]

Hal. 1 - 63

Juni 2013

ISSN 2088-6268

Diterbitkan oleh:

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI KESUMA NEGARA BLITAR
Jl. Mastrip 59 Blitar 66111, Telp./Fax : (0342) 802330/813788
Email : info@stieken.ac.id

[STIE KESUMA NEGARA BLITAR]

JURNAL KOMPILEK

Jurnal Kompilasi Ilmu Ekonomi

Daftar Isi :

- Retno Murni Sari* **PENGARUH STOCK SPLIT, EARNING PER SHARE, DAN DIVIDEN PER SHARE TERHADAP PERUBAHAN HARGA SAHAM (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur di BEI) (Hal 1-6)**
- Sandi Eka Suprajang* **PENGARUH KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN DALAM MEMBELI PRODUK (Studi pada Mahasiswa STIE Kesuma Negara Blitar Pengguna Kartu Selular IM3) (Hal 7-15)**
- Fajriya Muthmainah* **ANALISIS RASIO ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) UNTUK MENGIKUR KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kota Blitar) (Hal 16-24)**
- Reti Nurhabibah* **PENENTUAN TARIF JASA RAWAT INAP DENGAN METODE ACTIVITY-BASED COSTING SYSTEM PADA RUMAH SAKIT UMUM "NGUDI WALUYO" WLINGI (Studi Kasus Pada Rumah Sakit Umum Ngudi waluyo Wlingi) (Hal 25-34)**
- Djoko Sularso* **ANALISIS SEBELUM DAN SESUDAH PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NO. 43/PMK.010/2012 TERHADAP UANG MUKA, PENCAIRAN DAN PENJUALAN KENDARAAN BERMOGOR PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN (Studi Kasus Pada PT. Sasana Artha Finance Cabang Blitar) (Hal 35-42)**
- Irma Yulianti Ningsih/ Fadia Zen* **PENGARUH TOTAL ASSET TURNOVER DAN DEBT TO EQUITY RATIO TERHADAP NILAI PERUSAHAAN TOBIN'S Q MELALUI RENTABILITAS EKONOMI PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG LISTING DI BEI PERIODE 2008–2011 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN PADA KECAMATAN BANGKALAN (Hal 43-53)**
- Rosita Ratnasari/ Yudhanta Sambharakreshna* **KEMAMPUAN RASIO KEUANGAN SEBAGAI ALAT UNTUK MEMPREDIKSI PERINGKAT OBLIGASI PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI (Hal 54-63)**

**ANALISIS RASIO ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) UNTUK
MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus pada Pemerintah
Daerah Kota Blitar)**

FAJRIYA MUTHMAINAH
Inspektorat Kota Blitar

Abstraksi: Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Blitar yang diukur dengan menggunakan analisis rasio APBD dan mengetahui posisi kinerja keuangan dengan metode kuadran. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan teknik pengumpulan data secara dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Laporan Keuangan pemerintah daerah Kota Blitar tahun anggaran 2005-2010. Sedangkan analisis rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa rasio kemandirian keuangan daerah, rasio share, rasio efektivitas dan efisiensi PAD, rasio keserasian, rasio pertumbuhan (growth) dan pemetaan kinerja dengan metode kuadran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata RKKD selama kurun waktu 2005-2010 adalah 12,32% dan cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun, yang berarti ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan dana ekstern masih tinggi. Rasio share rata-rata adalah 11,01%, namun rasio share cenderung mengalami penurunan, sehingga PAD belum memberikan kontribusi yang optimal terhadap total belanja. Kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD sudah bisa dikatakan efektif, karena rasio efektivitas rata-rata 111,27%. Secara umum upaya pemerintah daerah dalam menggali PAD secara efisien telah berhasil, karena selama kurun waktu tahun 2005-2010 pada tahun 2007, 2008, 2009 dan 2010 rasio yang dicapai kurang dari 100% atau 1. Pada tahun 2005-2006 pemerintah daerah Kota Blitar lebih memprioritaskan alokasi belanjanya pada belanja pelayanan publik/belanja modal, sedangkan pada tahun-tahun setelah itu prioritas alokasi belanja pemerintah adalah pada belanja aparatur/belanja operasi. Tingkat pertumbuhan PAD rata-rata selama kurun waktu 2005-2010 adalah sebesar 14,68%, namun secara umum kenaikan realisasi PAD belum seimbang dengan pertambahan belanjanya. Peta kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Blitar selama kurun waktu 2005-2010 masih berfluktuasi. Posisi kinerja pada kuadran I terjadi tahun 2006, 2008 dan 2010. Sedangkan posisi kinerja pada kuadran IV terjadi pada tahun 2007 dan 2009. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Blitar belum dapat dikatakan baik.

Kata Kunci : Rasio APBD, Kinerja Keuangan

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak diberlakukannya otonomi daerah secara efektif pada tanggal 1 Januari 2001, daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dari pemerintah pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas serta aspirasi masyarakat. Kinerja keuangan daerah sesudah dilaksanakannya otonomi daerah seharusnya mengalami perbaikan yang ditandai dengan pergeseran peta ke kuadran yang lebih baik, karena daerah memiliki kesempatan yang semakin luas untuk menggali potensi-potensinya serta memiliki kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Oleh karena itu, pemerintah daerah

diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnnya melalui PAD, sehingga ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat harus semakin kecil dan peran PAD menjadi semakin besar. Gambaran tentang nilai-nilai penerimaan atau PAD yang dapat digali serta pemanfaatannya untuk belanja daerah dapat diketahui dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun oleh pemerintah daerah pada setiap periode.

APBD merupakan perwujudan kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangannya. UNDP (*United Nations Development Program*) menjelaskan bahwa paling tidak ada tiga hal yang harus dipenuhi untuk mewujudkan *good governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas publik dan *value for money (economy, efficiency and effectiveness)*. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung oleh mereka yang membutuhkan. Akuntabilitas publik merupakan bentuk

pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan, sedangkan *efficiency* dan *effectiveness* adalah upaya pengelolaan sumber daya publik secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif). Salah satu wujud transparasi dan akuntabilitas publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan penyusunan APBD serta laporan keuangan sebagai salah satu komponennya, yang menginformasikan tentang semua rencana kegiatan pemerintah daerah dalam bentuk angka, jumlah biaya yang harus dikeluarkan pada tahun anggaran tertentu, besaran pengalokasian belanja untuk belanja rutin/operasi maupun belanja pembangunan/modal dan lain-lain. Sedangkan perwujudan *efficiency* dan *effectiveness* dapat dilihat dari kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi-potensi penerimaan dengan biaya yang telah dialokasikan, tingkat keberhasilan dalam merealisasikan kegiatan yang telah direncanakan, baik yang berkaitan dengan tugas pemerintahan, pembangunan, maupun pelayanan kepada masyarakat, yang nantinya akan menunjukkan kinerja keuangan pemerintah

Penilaian terhadap kinerja pemerintah daerah bergantung pada seberapa jauh kemampuan dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakatnya dengan baik, sesuai dengan peraturan dan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan sebagai wujud konsekuensi otonomi daerah dan dalam rangka mewujudkan *good governance*, termasuk keharusan untuk mempunyai kemandirian keuangan yang tinggi karena adanya desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal dilakukan pada saat daerah mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Beberapa daerah dengan sumber daya yang dimiliki mampu menyelenggarakan otonomi daerah, namun tidak tertutup kemungkinan ada beberapa daerah akan menghadapi kesulitan dalam menyelenggarakan tugas desentralisasi, mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Blitar sebagai kota terkecil kedua di Jawa Timur setelah kota Mojokerto, dilihat dari kedudukan dan letak geografinya, tidak memiliki sumber daya alam yang berarti, karena sebagian besar wilayahnya adalah daerah perkotaan, layanan publik, perdagangan dan pemukiman. Hal ini mengakibatkan potensi PAD kota Blitar kecil dan tidak seimbang dengan pertumbuhan belanjanya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah rasio keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kota Blitar yang meliputi rasio kemandirian keuangan daerah, *share*, efektivitas PAD, efisiensi PAD, keserasian belanja dan *growth* (pertumbuhan) selama kurun waktu 2005-2010?
2. Bagaimanakah pemetaan kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Blitar selama kurun waktu 2005-2010 dengan metode kuadran?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui rasio keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kota Blitar yang meliputi rasio kemandirian keuangan daerah, *share*, efektivitas PAD, efisiensi PAD, keserasian belanja dan *growth* (pertumbuhan) selama kurun waktu 2005-2010.
2. Memetakan kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Blitar selama kurun waktu 2005-2010 dengan metode kuadran

II. TELAAH LITERATUR

A. Kajian Pustaka

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Menurut pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, "APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu", sedangkan menurut pasal 1 huruf b Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, "Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD".

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan pengelompokan atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah, dikelompokkan menjadi:
 - a. Pendapatan Asli Daerah, yang dibagi menurut jenis pendapatannya menjadi:
 - Pajak dan retribusi daerah

Pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup:
 - bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
 - bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN
 - bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
- Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup:

- penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- pendapatan dari hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- jasa giro
- pendapatan bunga
- penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
- penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah
- penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- pendapatan denda pajak
- pendapatan denda retribusi
- pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- pendapatan dari pengembalian fasilitas sosial dan fasilitas umum
- pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan

b. Dana Perimbangan

Kelompok pendapatan dana perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:

- dana bagi hasil
 - bagi hasil pajak
 - bagi hasil bukan pajak
 - dana alokasi umum
 - dana alokasi khusus
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
- Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup:
- hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat
 - dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam
 - dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota
 - dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah
 - bantuan keuangan

2. Belanja daerah, dikelompokkan berdasarkan:

- a. urusan pemerintahan yang dibagi menjadi:
 - urusan wajib
 - pendidikan
 - kesehatan
 - pekerjaan umum
 - perumahan rakyat
 - penataan ruang
 - perencanaan pembangunan
 - perhubungan
 - dan lain-lain
 - urusan pilihan
 - pertanian
 - kehutanan
 - energi dan sumber daya mineral
 - pariwisata
 - kelautan dan perikanan
 - perdagangan
 - perindustrian
 - transmigrasi
 - urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Organisasi. Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan

- dengan susunan organisasi pada masing-masing pemerintah daerah
- c. Program dan kegiatan. Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Kelompok belanja. Klasifikasi belanja menurut kelompok belanja terdiri dari:
 - belanja tidak langsung
Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:
 - belanja pegawai
 - bunga
 - subsidi
 - hibah
 - bantuan sosial
 - belanja bagi hasil
 - bantuan keuangan
 - belanja tidak terduga.
 - belanja langsung
Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:
 - belanja pegawai
 - belanja barang dan jasa
 - belanja modal

3. Pembiayaan, terdiri dari:

- Penerimaan pembiayaan
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya
 - Pencairan dana cadangan
 - Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - Penerimaan pinjaman daerah
 - Penerimaan kembali pemberian pinjaman
 - Penerimaan piutang daerah
- Pengeluaran pembiayaan
 - Pembentukan dana cadangan
 - Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
 - Pembayaran pokok utang
 - Pemberian pinjaman daerah

2. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam Mardiasmo (2002: 121) disebutkan bahwa pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksud untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk

pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Evaluasi terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab serta fungsinya dapat dilakukan dengan penilaian menggunakan sistem pengukuran kinerja serta indikator-indikatornya yang meliputi: (1) Masukan (*input*), yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan (*output*) keluaran, (2) Keluaran, yaitu tolak ukur kinerja berdasarkan produk barang/jasa yang dihasilkan dari program atau kegiatan sesuai dengan masukan yang digunakan, (3) Hasil adalah tolak ukur kinerja berdasarkan tingkat keberhasilan yang dicapai berdasarkan keluaran program atau kegiatan yang sudah dihasilkan, (4) Manfaat, yaitu tolak ukur kinerja berdasarkan tingkat kemanfaatan yang dirasakan sebagai nilai tambah bagi masyarakat dan pemerintah daerah, (5) Dampak, adalah tolak ukur kinerja berdasarkan dampaknya terhadap kondisi makro yang ingin dicapai dari manfaat. Pengukuran dan indikator kinerja tersebut digunakan untuk memperbandingkan antara satu daerah dengan daerah lain, atau dengan hasil tahun-tahun sebelumnya untuk masing-masing daerah.

a. Analisis Rasio Keuangan

Menurut Halim (2007: 150) "Analisis Rasio Keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi.

Pengklasifikasian angka-angka rasio keuangan yang bersumber dari APBD menurut Halim (2007: 150) adalah sebagai berikut :

1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Daerah (otonomi fiskal) adalah rasio yang digunakan sebagai tolak ukur dalam menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan As. Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah + Sumbangan + Pendapatan Pajak}}$$

2) Rasio Share

Share merupakan rasio PAD terhadap total belanja daerah. Rasio ini mengukur seberapa jauh kemampuan daerah untuk membiayai kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan. Rasio ini dapat digunakan untuk melihat

kapasitas kemampuan keuangan daerah (Setiaji dan Adi, 2006: 5).

$$Share = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Belanja}}$$

3) Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rasio efektivitas PAD adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}}$$

4) Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rasio efisiensi PAD adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatan tersebut efisien atau tidak.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi PAD}}$$

5) Rasio Keserasian

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Secara sederhana, rasio keserasian itu dapat diinformulasikan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Keserasian} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}}$$

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}}$$

6) Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang dicapai dari periode ke periode berikutnya. Berikut contoh perhitungan untuk pertumbuhan PAD:

$$\text{Pertumbuhan PAD tahun II} = \frac{\text{PAD tahun II} - \text{PAD tahun I}}{\text{PAD Tahun I}}$$

b. Metode Kuadran

Metode kuadran adalah salah satu cara menampilkan peta kemampuan keuangan daerah (Bappenas, 2003). Masing-masing kuadran ditentukan oleh besaran nilai rasio *share* dan *growth*. Dengan nilai rasio *share* dan *growth* maka masing-masing pemerintah daerah dapat diketahui posisinya (pada kuadran berapa).

KUADRAN	KONDISI
I	Kondisi paling ideal. PAD mengambil peran besar dalam Total Belanja dan daerah punya kemampuan mengembangkan potensi lokal. Kondisi ini ditunjukkan dengan besarnya nilai <i>share</i> disertai nilai <i>growth</i> yang tinggi.
II	Kondisi ini belum ideal, tapi daerah punya kemampuan mengembangkan potensi lokal sehingga PAD berpeluang memiliki peran besar dalam Total Belanja. Sumbangan PAD terhadap Total Belanja masih rendah namun pertumbuhan (<i>growth</i>) PAD tinggi.
III	Kondisi ini juga belum ideal. Peran PAD yang besar dalam Total Belanja punya peluang mengecil karena pertumbuhan PAD nya kecil. Sumbangan PAD terhadap Total Belanja tinggi, namun pertumbuhan PAD rendah.
IV	Kondisi ini paling buruk, PAD belum mengambil peran yang besar dalam Total Belanja dan daerah belum punya kemampuan mengembangkan potensi lokal. Sumbangan PAD terhadap Total Belanja rendah dan pertumbuhan PAD rendah.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu suatu metode penelitian suatu objek pada masa sekarang, dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti (Nazir, 2005: 54).

Teknik yang digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan adalah teknik dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari catatan-catatan, laporan-laporan atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan tujuan penelitian. Dalam hal ini yaitu dengan cara mempelajari laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Blitar.

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif yaitu dengan menggunakan analisis rasio terhadap komponen-komponen APBD.

IV. HASIL DAN ANALISIS PENGUJIAN

A. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rata-rata RKKD selama kurun waktu 2005-2010 adalah 12,32%. RKKD tertinggi dicapai pada tahun 2005 yaitu sebesar 14,23% yang berarti pada tahun ini tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan dana ekstern paling rendah dibandingkan dengan tahun-tahun untuk memenuhi segala kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakatnya dengan PAD yang dimiliki sesudahnya sehingga daerah memiliki kemampuan yang cukup baik.

B. Rasio Share

Secara umum jika dilihat dari persentase rasio share selama kurun waktu 2005-2010 yang cenderung mengalami penurunan, berarti bahwa PAD belum memberikan kontribusi yang optimal terhadap total belanja pemerintah daerah.

C. Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas PAD adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rasio efektivitas PAD rata-rata selama kurun waktu tahun 2005-2010 adalah 111,27%, yang berarti bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD sangat efektif, karena realisasi yang dicapai seringkali melebihi dari target yang telah ditetapkan. Rasio efektivitas PAD tertinggi terjadi pada tahun 2005, yaitu sebesar 126,89%.

D. Rasio Efisiensi PAD

Rasio Efisiensi PAD adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

Rasio efisiensi PAD rata-rata selama kurun waktu tahun 2005-2010 adalah 5,87%. Rasio efisiensi PAD tertinggi terjadi pada tahun 2005 yaitu sebesar 13,41%, sedangkan rasio terendah adalah 2,67% terjadi pada tahun 2010. Berkebalikan dengan rasio efektivitas PAD, pada rasio efisiensi PAD, semakin kecil rasio maka menunjukkan kemampuan pemerintah daerah yang semakin baik dalam meminimalisir biaya untuk memperoleh PAD secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2010 adalah pencapaian paling efisien jika dibandingkan dengan tahun-tahun yang lain selama kurun waktu 2005-2010.

E. Rasio Keserasian

1. Rasio Keserasian Belanja Aparatur /Belanja Operasi

Rasio keserasian belanja aparatur/belanja operasi rata-rata selama kurun waktu tahun 2005-2010 adalah 56,42%. Rasio keserasian belanja aparatur/belanja operasi tertinggi adalah 78,05% pada tahun 2010 dan terendah sebesar 22,16% pada tahun 2006.

2. Rasio Keserasian Belanja Pelayanan Publik/Belanja Modal

Pada tahun 2005 dan 2006, belanja aparatur/belanja operasi pemerintah daerah lebih kecil jika dibandingkan dengan belanja pelayanan publik/belanja modal. Belanja aparatur/belanja operasi pemerintah daerah tahun 2005 adalah sebesar 25,22% dan tahun 2006 sebesar 22,16%, sedangkan belanja pelayanan publik/belanja modalnya adalah sebesar 74,78% dan 77,84%. Hal ini berarti, pada dua tahun tersebut pemerintah daerah lebih memfokuskan kegiatannya pada pembangunan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat, seperti belanja modal bangunan pasar, belanja modal alat-alat laboratorium kesehatan, pengembangan sarana dan prasarana balai benih ikan serta pusat informasi agrobisnis ikan koi dan lain-lain.

Mulai tahun 2007, proporsi belanja pemerintah daerah mengalami perubahan, yaitu lebih banyak digunakan untuk belanja aparatur/belanja operasi dari pada belanja pelayanan publik/belanja modal. Tahun 2007 proporsi belanja pemerintah daerah adalah 71,54% untuk belanja aparatur/belanja operasi dan 28,25% untuk belanja pelayanan publik/belanja modal.

Pada tahun 2007-2010, jumlah belanja aparatur/belanja operasi memiliki tren yang cenderung meningkat. Hal ini disebabkan karena, jumlah pegawai yang semakin bertambah dari tahun ke tahun yang diikuti dengan adanya kebijakan kenaikan gaji pegawai dan peningkatan kesejahteraan umum pegawai (seperti pemberian uang makan). Selain itu, perbedaan proporsi belanja antara belanja aparatur/belanja operasi dan belanja pelayanan publik/belanja modal juga dipengaruhi oleh kebijakan umum belanja yang ditetapkan pemerintah daerah untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

F. Rasio Growth

Rasio Pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dalam hal ini indikator yang digunakan adalah pendapatan asli daerah (PAD).

Secara umum, selama kurun waktu 2005-2010 terlihat bahwa realisasi PAD cenderung mengalami kenaikan, namun kenaikan realisasi PAD tersebut belum seimbang dengan pertambahan jumlah belanjanya.

G. Metode Kuadran

Metode kuadran adalah salah satu cara menampilkan peta kemampuan keuangan daerah. Masing-masing kuadran ditentukan oleh besaran nilai rasio *share* dan *growth*. Dengan nilai rasio *share* dan *growth* maka akan diketahui posisi pemerintah daerah pada kurun waktu tertentu pada kuadran berapa.

Posisi kinerja pada kuadran I terjadi tahun 2006, 2008 dan 2010. Hal ini berarti bahwa pada tahun-tahun tersebut PAD memiliki peran besar dalam total belanja dan daerah mempunyai kemampuan untuk mengembangkan PAD-nya. Pada tahun-tahun tersebut upaya pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD berjalan efektif, target yang telah ditetapkan selalu dapat terlampaui, sehingga PAD juga mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Selain itu tingkat ketergantungan pemerintah terhadap dana ekstern juga rendah dibandingkan dengan tahun-tahun yang lain, karena kontribusi PAD terhadap belanja sudah cukup tinggi. Sedangkan posisi kinerja pada kuadran IV terjadi pada tahun 2007 dan 2009. Pada dua tahun tersebut kontribusi PAD terhadap belanja rendah karena kenaikan belanja tidak diikuti dengan kenaikan PAD, sehingga pemerintah daerah

lebih banyak bergantung pada dana ekstern. Pertumbuhan PAD juga bernilai negatif, artinya realisasi PAD pada tahun tersebut lebih kecil dari pada tahun sebelumnya.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis rasio keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama kurun waktu 2005-2010 dapat diketahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Blitar adalah sebagai berikut:
 - a. RKKD selama kurun waktu 2005-2010 cenderung mengalami penurunan. Hal ini berarti bahwa ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan dana ekstern masih tinggi. Rata-rata tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah Kota Blitar adalah 12,32%. Tingkat kemandirian keuangan tertinggi dicapai pada tahun 2005 yaitu sebesar 14,23% dan terendah sebesar 10,23 % terjadi pada tahun 2007.
 - b. Rasio *share* rata-rata adalah 11,01%. Rasio tertinggi adalah 12,67% terjadi pada tahun 2005 dan terendah 8,94% terjadi pada tahun 2007. Namun selama kurun waktu 2005-2010 rasio *share* cenderung mengalami penurunan, sehingga PAD belum memberikan kontribusi yang optimal terhadap total belanja pemerintah daerah.
 - c. Kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD berdasarkan target yang telah ditetapkan sudah bisa dikatakan efektif, karena rasio efektivitas PAD selama kurun waktu 2005-2010 cenderung mencapai di atas 100% atau 1 dan hanya rasio pada tahun 2007 yang mencapai nilai dibawah 100% atau 1. Rata-rata rasio efektivitas PAD adalah 111,27%. Rasio efektivitas PAD tertinggi adalah 77 126,89% pada tahun 2005 sedangkan rasio terendah adalah 96,36 % terjadi pada tahun 2007.
 - d. Rasio efisiensi PAD rata-rata adalah 5,87%. Rasio efisiensi tertinggi terjadi pada tahun 2005, yaitu sebesar 13,41%, sedangkan rasio terendah 2,67% terjadi tahun 2010. Secara umum upaya pemerintah daerah dalam menggali PAD secara efisien telah berhasil, karena selama kurun waktu tahun 2005-2010 pada tahun 2007, 2008, 2009 dan 2010 rasio yang dicapai kurang dari 100% atau 1.

- e. Pada tahun 2005-2006 pemerintah daerah Kota Blitar lebih memprioritaskan alokasi belanjanya pada belanja pelayanan publik/belanja modal, sedangkan pada tahun-tahun setelah itu prioritas alokasi belanja pemerintah adalah pada belanja aparatur/belanja operasi. Pergeseran prioritas alokasi belanja ini didasarkan atas kebutuhan dan tujuan pemerintah daerah yang ingin dicapai melalui visi misi yang telah ditetapkan.
- f. Tingkat pertumbuhan PAD rata-rata selama kurun waktu 2005-2010 adalah sebesar 14,68%. Pada tahun 2006, 2008 dan 2010 tingkat pertumbuhannya bernilai positif dengan rasio tertinggi 52,66% pada tahun 2008. Sedangkan pada dua tahun yang lain, yaitu tahun 2007 dan 2009 tingkat pertumbuhan bernilai negatif dengan persentase penurunan -2,29% yang terjadi pada 2009. Secara umum realisasi PAD dari tahun ke tahun cenderung mengalami kenaikan, namun kenaikan tersebut belum seimbang dengan pertambahan belanjanya.
2. Pada peta kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Blitar selama kurun waktu 2005-2010 diketahui bahwa posisi kinerja yang diduduki masih berfluktuasi antara kuadran I dan kuadran IV. Posisi kinerja pada kuadran I terjadi tahun 2006, 2008 dan 2010. Hal ini berarti bahwa pada tahun-tahun tersebut PAD memiliki peran besar dalam total belanja dibandingkan dengan tahun-tahun lainnya dan daerah mempunyai kemampuan untuk mengoptimalkan PAD-nya. Sedangkan posisi kinerja pada kuadran IV terjadi pada tahun 2007 dan 2009. Pada dua tahun tersebut kontribusi PAD terhadap belanja rendah karena kenaikan belanja tidak diikuti dengan kenaikan PAD, sehingga pemerintah daerah lebih banyak bergantung pada dana ekstern.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Kota Blitar Mengingat posisi kinerja pemerintah Kota Blitar pada metode kuadran yang belum stabil dan ketergantungan terhadap bantuan dana ekstern cenderung tinggi, pertumbuhan PAD belum sebanding dengan pertambahan belanjanya sehingga kontribusi PAD terhadap belanja belum optimal, maka dalam upaya mewujudkan amanat otonomi daerah dan *good governance* disarankan kepada pemerintah Kota Blitar agar:
 - a. Terus berupaya mencari sumber pendapatan yang potensial seperti pembangunan tempat wisata baru, pusat perbelanjaan modern dan lain-lain.
 - b. Meningkatkan kualitas pelayanan/jasa yang diberikan, melihat dari segi wilayah tidak memiliki potensi alam yang dapat diandalkan hasilnya secara kontinyu dan sumber PAD terbesar berasal dari retribusi dan pajak.
 - c. Melakukan evaluasi terhadap setiap kebijakan yang berkaitan dengan pendapatan dan belanja daerah sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan yang lebih baik pada tahun berikutnya.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya Pada penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan objek penelitian yang lebih luas, sehingga dapat diperoleh gambaran tentang kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Blitar dibandingkan dengan pemerintah daerah lain.

VI. DAFTAR REFERENSI

- Abdul Halim.** 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Bappenas.** 2003. *Peta Kemampuan Keuangan Provinsi Dalam Era Otonomi Daerah: Tinjauan atas Kinerja PAD, dan Upaya yang Dilakukan Daerah terutama berdasarkan Kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD)*, Jakarta: Jurnal Bappenas.
- Mardiasmo.** 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nazir.** 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Setiaji, Adi.** 2006. *Rasio Keuangan Daerah dan Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Repository UKSW press.
- Sudrajad.** 2005. *Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Ngawi*. Ngawi: Perpustakaan Online.
- Yudistiantono.** 2008. *Pemetaan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Propinsi Jawa Timur*. Surabaya: Artikel Pemda Prov. Jatim.
-, *Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pertanggungjawaban dan Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah*. Online: <http://www.bpkp.go.id/uu/filedownload/4/66/1193.bpkp>.

-, 2002. Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan. Online: unsrat.ac.id/men/mendagri_29_2002.pdf
-, 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Online: hukum.unsrat.ac.id/men/permendagri_1_3_2006.pdf.
-, 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Online: <http://www.bpkp.go.id/uu/filedownload/4/60/873.bpkp>
-, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Online: http://www.perbendaharaan.go.id/donlot_jump.php.